

PENGUATAN GERAKAN KECAMATAN SADAR DEMOKRASI PADA KELOMPOK TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN

Taufik Nurohman¹, Fitriyani Yuliawati², Wiwi Widiastuti³, Riska Sarofah^{4*}

^{1,2,3,4}Jurusan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Indonesia

riskasarofah@unsil.ac.id⁴

ABSTRAK

Abstrak: Gerakan sadar demokrasi harus dilaksanakan dengan berkolaborasi dari berbagai sector terutama perempuan. Program pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan skema pemberdayaan masyarakat unggulan program studi (PbM-PUPS). Kecamatan sadar demokrasi merupakan program inovasi dari Jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keterlibatan akademisi dalam Pendidikan politik terutama masalah demokrasi substantif dan prosedural. Sasaran utama pada program ini adalah Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Cipedes. Mitra dilakukan dengan PKK dengan jumlah perempuan sebanyak 45. Kelompok perempuan ini memiliki mitra kerja pemerintah, Organisasi kemasyarakatan maupun kelurahan. Metode pengabdian ini dengan memberikan pelatihan mengenai konsep demokrasi dan civil society, upaya keterlibatan dalam pemilihan umum yang berintegritas serta menginisiasi Gerakan sadar demokrasi dengan melibatkan Kelompok masyarakat Kelurahan Cipedes, Nagarasari, Panglayungan, dan Sukamanah. Melalui Gerakan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam partisipasi politik terutama dalam menyongsong Pemilihan Umum Serentak tahun 2024. Selain itu, kontribusi terhadap peran perempuan dalam menumbuhkan kesadaran orientasi pemahaman dasar tentang demokrasi dan politik baik bagi individu maupun kelompok melalui program pengabdian ini. Demokrasi yang sehat, adil dan menjunjung tinggi kesetaraan bisa diinisiasi apabila keterlibatan perempuan terutama pada pembangunan indeks demokrasi. Melalui kesadaran perempuan dapat memberikan kesempatan sebagai strategi pengarusutamaan gender yang akan mempercepat pembangunan berkelanjutan. Hasil pengabdian ini melalui pre-test dan post-test dengan rata-rata keberhasilan sebanyak 87 %.

Kata Kunci: Demokrasi; Tim Penggerak; Perempuan.

Abstract: The democratic awareness movement must be implemented in collaboration with various sectors, especially women. This community service program is carried out with a superior study program community empowerment scheme (PbM-PUPS). The Democracy Awareness District is an innovation program from the Political Science Department of Siliwangi University. This is motivated by the importance of academic involvement in political education, especially substantive and procedural democracy issues. The main target of this program is the Family Welfare Empowerment Team (PKK) in Cipedes District. The partnership is carried out with the PKK with a total of 45 women. This women's group has government partners, community organizations and sub-districts. This research method involves providing training on the concepts of democracy and civil society, efforts to involve people in general elections with integrity and initiating a democratic awareness movement involving community groups in Cipedes, Nagarasari, Panglayungan and Sukamanah subdistricts. Through this movement, it is hoped that it will be able to contribute to the importance of community involvement in political participation, especially in welcoming the 2024 Simultaneous General Election. In addition, it will contribute to the role of women in raising awareness of basic understanding of democracy and politics for both individuals and groups through this service program. A democracy that is healthy, fair and upholds equality can be initiated if women are involved, especially in developing the democracy index. Through awareness, women can provide opportunities as a gender mainstreaming strategy that will accelerate sustainable development. The results of this service were through pre-test and post-test with an average success of 87%.

Keywords: Democracy; Mobilization Team; Women.



Article History:

Received : 17-10-2023

Revised : 08-01-2024

Accepted : 20-01-2024

Online : 06-02-2024



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami banyak tantangan yang cukup serius terutama dalam perjalanan pemilihan umum di Indonesia. Pemasalahan seperti politik uang, politik dinasti dan tingkat golput yang tinggi menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan dampak positif dari demokrasi Indonesia (Abhipraya et al., 2020; Khairazi, 2015). Namun disisi lain Indonesia tidak boleh hanya berfokus pada demokrasi prosedural saja, namun juga terus memperbaiki kondisi demokrasi procedural misalnya hak untuk menyampaikan pendapat, terlibat dalam organisasi maupun hak kelompok untuk mendapatkan kesetaraan publik (Irtanto, 2015; Sofianto, 2011). Keberhasilan indeks demokrasi Indonesia tidak mengalami peningkatan/stagnan dengan masuk peringkat 54 negara di dunia. Indeks demokrasi memiliki 5 kategori antara lain pluralisme dan proses pemilu, fungsi pemerintahan, indikator partisipasi politik, dan kebebasan demokrasi. Namun sayangnya, Indonesia masih masuk dalam kategori demokrasi cacat (*flawed democracies*). Oleh karena itu data ini menunjukkan bahwa perlu ada peran yang sinergis antar kelompok masyarakat maupun pemerintah dalam mewujudkan demokrasi yang ideal.

Pemahaman tentang demokrassi terutama pada tahun menjelang pemilu serentak tahun 2024 sering sekali membingungkan masyarakat terutama kesepakatan untuk menerapkan demokrasi perwakilan. Sudah sangat jelas bahwa konsep demokrasi perwakilan menempatkan rakyat untuk menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam perjalanan pemerintahan. Banyak kebijakan pemerintah yang menimbulkan protes atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Padahal demokrasi perwakilan harus memutuskan kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang menjadi bagian perwakilannya. Solusi untuk memastikan proses monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah adalah pemahaman masyarakat tentang posisinya dalam negara demokrasi (Muzaqqi, 2013; Noor, 2018; Wahyuningsih et al., 2021; Zuhro, 2018).

Salah satu peran masyarakat bisa melalui kelompok organisasi perempuan yaitu kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga terhadap demokrasi. Kelompok ini bisa menjadi penggerak utama dalam proses demokrasi (Esfandiari & Cholidah, 2021). Keberhasilan demokrasi tidak terlepas dari perempuan sebagai motor penggerak dalam membangun keluarga yang sehat, sejahtera, maju, produktif dan mandiri. Berdasarkan hasil FGD dan survey secara langsung terdapat beberapa masalah berikut diantaranya kegiatan kelompok tim penggerak PKK Kecamatan Cipedes belum ada kegiatan pengembangan demokrasi, materi sosialisasi mengenai upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas masih sangat terbatas, tim penggerak PKK memiliki peluang untuk menjadi sarana penyebaran informasi kepada kelurahan, kelompok industry, komunitas dan pemuda, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal dalam penguatan demokrasi kecamatan setempat, belum ada Gerakan sadar demokrasi yang bisa menjadi

pioneer peningkatan pemahaman tentang demokrasi yang berdampak pada perwujudan pemilu yang berintegritas dan sosialisasi mengenai Pendidikan politik selama ini hanya terbatas pada Pendidikan pemilih bukan pada konteks menegakkan pemahaman demokrasi substantif.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat pada Gerakan Kecamatan sadar demokrasi dilakukan dengan tahapan. Profil mitra yaitu Kelompok penggerak kesejahteraan keluarga di Kecamatan Cipedes. Beberapa tahapan kegiatan dilakukan diantaranya:

1. Persiapan

Kelompok pengabdian melakukan survey untuk menentukan objek PKM khususnya tim penggerak PKK. Kemudian kunjungan dan melakukan FGD untuk mengusun permasalahan mitra

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan dilakukan diantaranya pelatihan materi tentang peran perempuan dan komunitas dalam demokrasi Indonesia, pelatihan pengembangan pemilu berintegritas menuju pemilu serentak tahun 2024.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan diantaranya melaksanakan pre dan post test pada kegiatan pelatihan serta simulasi role sharing pada Gerakan sadar demokrasi bersama mitra. Pelaksanaan pendekatan pelatihan harus mampu diterima oleh berbagai stakeholders (Abdi Muhammad et al., 2020; Destemi & Hartati, 2020; Gani et al., 2022). Metode dapat dilakukan dengan ceramah dan diskusi dengan tim penggerak PKK, Karang taruna dan kelompok komunitas perempuan, ibu rumah tangga, serta masyarakat desa. Tujuannya adalah menggali informasi maupun solusi dalam memotivasi kelompok perempuan untuk berpartisipasi aktif menyukseskan pemahaman demokrasi dan implementasinya bagi pemilu 2024. Pelatihan akan memberikan materi pentingnya kontribusi perempuan pada demokrasi dan perannya dalam mewujudkan pemilu berintegritas tahun 2024.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan kajian kebutuhan kelompok penggerak dengan penguatan demokrasi. Pada kegiatan persiapan ini membantu dalam memberikan jenis prioritas kegiatan

2. Pelaksanaan

a. Peningkatan Pemahaman Demokrasi pada Kader PKK Kecamatan Cipedes

Langkah pertama yang dilakukan oleh TIM PPM adalah dengan melaksanakan pemetaan terhadap kondisi pemahaman demokrasi pada penggerak PKK Kecamatan Cipedes. Pemetaan tersebut dilakukan dengan mengadakan pre test terkait dengan pemahaman demokrasi khususnya dalam kehidupan sehari-hari dan pada proses pemilu. Dari hasil pemetaan tersebut terlihat bahwa telah ada protensi baik dari pemahaman atas demokrasi pada para kader PKK Kecamatan Cipedes, namun ada beberapa kelemahan seperti mereka berpandangan bahwa demokrasi hanya ada pada proses pemilu dan bernegara semata, sementara itu dalam kehidupan keseharian mereka tidak dilaksanakan dengan nilai-nilai demokrasi, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pemberian Pemahaman Demokrasi pada Kader PKK

Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023.

Demokrasi memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari individu dan masyarakat (Puji Laksono, 2020; Suharyanto, 2016). Berikut beberapa cara di mana demokrasi berpengaruh pada kehidupan sehari-hari:

1) Hak Memilih

Salah satu aspek paling mendasar dari demokrasi adalah hak untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil dalam pemerintahan. Dalam pemilihan umum, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih para pemimpin mereka, yang akan memengaruhi arah kebijakan pemerintah dan pengambilan keputusan dalam berbagai isu yang memengaruhi masyarakat.

2) Kebebasan Berbicara:

Demokrasi mendorong kebebasan berbicara. Individu memiliki hak untuk mengemukakan pendapat, berbicara tentang isu-isu yang penting bagi mereka, dan kritik terhadap pemerintah atau pihak berwenang tanpa takut akan hukuman. Ini juga berarti mendukung

media yang independen yang menyediakan berita dan informasi yang beragama.

3) Perlindungan Hukum

Demokrasi juga melibatkan sistem hukum yang adil dan transparan. Individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika hak-hak mereka dilanggar atau jika mereka terlibat dalam perselisihan hukum.

4) Partisipasi dalam Proses Pembuatan Keputusan

Dalam masyarakat demokratis, warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan melalui mekanisme seperti diskusi masyarakat, konsultasi publik, dan pengumpulan umpan balik tentang kebijakan yang sedang dibahas.

5) Kesejahteraan dan Layanan Publik

Demokrasi dapat memengaruhi penyediaan layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan banyak lagi. Kebijakan dan alokasi anggaran dalam masyarakat demokratis dapat dipengaruhi oleh kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh pemimpin yang mereka pilih.

6) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Demokrasi cenderung mendukung perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak individu seperti kebebasan beragama, kebebasan berorganisasi, dan hak untuk tidak mengalami diskriminasi.

7) Keragaman Budaya dan Sosial

Demokrasi sering kali menciptakan lingkungan yang mendukung keragaman budaya, sosial, dan politik. Ini berarti masyarakat dapat memelihara dan merayakan beragam identitas, keyakinan, dan nilai-nilai.

8) Keterlibatan dalam Aktivisme Sosial

Dalam demokrasi, individu dan kelompok memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam aktivisme sosial dan advokasi untuk isu-isu yang penting bagi mereka. Ini dapat mencakup demonstrasi, petisi, dan kampanye sosial.

9) Rasa Kepemilikan dan Tanggung Jawab

Warga negara dalam masyarakat demokratis merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga sistem demokrasi tersebut dengan cara memilih pemimpin yang sesuai dengan nilai dan aspirasi mereka, serta terlibat dalam proses politik dan sosial.

10) Pembangunan Komunitas

Demokrasi dapat mempromosikan pembangunan komunitas yang kuat, karena individu dan kelompok berkolaborasi untuk mengatasi masalah bersama dan mengambil keputusan yang memengaruhi lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi, demokrasi tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga berpengaruh pada banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk hak-hak individu,

keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, dan pembangunan sosial dan ekonomi.

Selain memberikan pemahaman terkait dengan demokrasi terhadap kader PKK Kecamatan Cipedes, TIM PPM juga memberikan pemahaman terkait dengan partisipasi politik. Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses politik dan pengambilan keputusan dalam suatu negara atau masyarakat. Ini adalah elemen kunci dalam demokrasi dan merupakan cara di mana warga negara dapat memengaruhi perubahan politik dan sosial. Berikut beberapa bentuk partisipasi politik antara lain pemahaman pemilihan umum, prosedur pencalonan politik, kampanye, aktivisme, partisipasi dalam pemilihan umum.

Partisipasi politik adalah cara yang penting bagi warga negara untuk memengaruhi arah dan kebijakan pemerintah serta untuk menjaga sistem demokrasi yang sehat. Sebagai bagian dari kaum perempuan, Kader PKK Kecamatan Cipedes sangat penting untuk ikut berpartisipasi di ranah publik khususnya terkait dengan partisipasi politik. Oleh karena itu, tim PPM memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya partisipasi politik perempuan. Partisipasi politik perempuan adalah upaya untuk melibatkan perempuan dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai pemimpin, dan untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan perempuan diakui dan diwakili dalam pembuatan keputusan politik. Peningkatan partisipasi politik perempuan memiliki banyak manfaat, termasuk mewujudkan kesetaraan gender dan memperkaya pemahaman dan perspektif dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan:

1) Pemberian Hak Memilih

Penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memilih dalam pemilihan umum. Ini termasuk menghapus hambatan hukum atau budaya yang mungkin menghambat akses perempuan ke tempat pemungutan suara.

2) Pendidikan Politik

Meningkatkan literasi politik perempuan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan politik yang memungkinkan mereka untuk memahami proses politik, partai politik, dan isu-isu yang relevan.

3) Promosi Perempuan sebagai Kandidat

Partai politik dan pemimpin politik harus aktif mempromosikan perempuan sebagai kandidat dalam pemilihan umum. Ini dapat mencakup memberikan dukungan finansial, pelatihan, dan sumber daya lainnya kepada perempuan yang ingin terlibat dalam politik.

4) Kuota Perempuan

Beberapa negara telah mengadopsi kuota perempuan, yang mengharuskan partai politik untuk mencalonkan sejumlah perempuan dalam pemilihan umum. Hal ini dapat membantu meningkatkan jumlah perempuan di parlemen atau lembaga pemerintahan lainnya.

5) Mendorong Kepemimpinan Perempuan:

Mendukung perempuan untuk memegang jabatan-jabatan kepemimpinan di berbagai tingkatan pemerintahan dan dalam organisasi politik adalah cara lain untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.

Terkait dengan perhelatan pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, TIM PPM juga memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. Menjadi pemilih yang cerdas adalah langkah penting dalam mendukung proses demokrasi dan memastikan pengambilan keputusan yang baik dalam pemilihan umum. Berikut beberapa langkah yang dapat membantu kita menjadi pemilih yang cerdas:

1) Pendidikan Politik:

Salah satu langkah pertama adalah memahami dasar-dasar politik. Pelajari tentang sistem politik negara kita, seperti bagaimana pemilihan umum diadakan, peran berbagai lembaga pemerintah, dan hak dan kewajiban pemilih. Ada banyak sumber daya pendidikan politik yang tersedia secara online, seperti buku, kursus online, dan materi edukatif.

2) Berita yang Terpercaya:

Konsumsi berita dari sumber yang dapat dipercaya. Cari sumber berita yang netral dan tidak bias, dan pastikan untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Hindari tersebarluaskannya berita palsu atau informasi yang tidak diverifikasi.

3) Pemahaman Isu-isu Penting:

Kenali isu-isu penting yang memengaruhi masyarakat. Pertimbangkan isu-isu seperti ekonomi, pendidikan, perawatan kesehatan, lingkungan, dan kebijakan luar negeri. Pahami posisi calon-calon politik pada isu-isu tersebut.

Proses menjadi pemilih yang cerdas adalah perjalanan terus-menerus. Terus belajar tentang politik dan isu-isu terkini, dan tetap berpartisipasi dalam proses politik setelah pemilihan umum. Menjadi pemilih yang cerdas adalah cara penting untuk mendukung proses demokrasi yang kuat dan memastikan bahwa suara kita diwakili dengan baik dalam pengambilan keputusan politik, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Publikasi pada Surat Kabar Priangan
Sumber: Sumber Penulis, 2023.

b. Penandatanganan Komitmen Bersama Gerakan Kecamatan Sadar Demokrasi

Pentingnya menjadi pemilih yang cerdas dan menjadi bagian dari penguatan demokrasi di Indonesia serta berperan penting dalam peningkatan tingkat partisipasi politik pada Pemilu 2024 mendatang, merupakan hal penting yang menjadi salah satu agenda dari kegiatan PPM yang dilaksanakan di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penandatanganan Komitmen Bersama Gerakan Kecamatan Sadar Demokrasi. Penandatanganan Komitmen Bersama Gerakan Kecamatan Sadar Demokrasi tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 4 Juli 2023 yang bertempat di Aula Kantor Kecamatan Cipedes. Penandatanganan Komitmen Bersama ini dihadiri secara langsung oleh Camat Cipedes (Cecep Ridwan, S.STP., M.Si), Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cipedes (Deli Dahlia, SE. Ak., M.Si), Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi (Ir. Nina Herlina, Dra., M.T), seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Penandatanganan Komitmen Bersama Kader Sadar Demokrasi Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023.

Komitmen bersama ini ditandatangani oleh semua kader PKK Kecamatan Cipedes bersama TIM PPM. Komitmen bersama sadar terhadap demokrasi sangat penting dalam memelihara dan memperkuat sistem demokrasi dalam suatu masyarakat. Ini memiliki berbagai manfaat dan relevansi, antara lain Pemeliharaan Nilai-nilai Demokrasi, Pertumbuhan Kepemimpinan Demokratis, Pengambilan Keputusan yang Baik, Perlindungan Hak Asasi Manusia dan pengendalian korupsi. Pentingnya komitmen bersama sadar terhadap demokrasi adalah bahwa hal ini merupakan fondasi yang kuat untuk pembangunan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam masyarakat yang komitmen bersama sadar terhadap demokrasi, hak dan aspirasi semua warga dihormati, dan pemimpin diharapkan untuk melayani dengan integritas dan transparansi.

3. Evaluasi

Dalam upaya menjamin keberlanjutan program penguatan demokrasi di Kecamatan Cipedes, Tim PPM menginisiasi untuk membentuk kader Sadar Demokrasi yang langsung dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi (Ir. Nina Herlina, Dra., M.T) sebagai pengawas dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cipedes (Deli Dahlia, S.E., Ak., M.Si) sebagai pimpinan langsung Kader Sadar Demokrasi. Kader sadar demokrasi Kecamatan Cipedes dibentuk sebagai upaya menjadikan kader PKK sebagai individu yang memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip demokrasi dan berkomitmen untuk mempromosikan, melindungi dan memperkuat sistem demokrasi dalam masyarakat. Peran kader sadar demokrasi sangat penting dalam membangun dan memelihara demokrasi yang kuat. Berikut beberapa karakteristik dan peran kader sadar demokrasi yang diupayakan di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya:

a. Pemahaman yang Mendalam tentang Demokrasi

Kader sadar demokrasi memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep demokrasi, prinsip-prinsipnya, dan bagaimana sistem demokrasi bekerja. Mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang hak-hak asasi manusia, kebebasan berbicara, pemilihan umum, dan mekanisme demokratis lainnya.

b. Komitmen untuk Nilai-nilai Demokrasi.

Mereka memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, keadilan, partisipasi, pluralisme, dan akuntabilitas.

c. Partisipasi Aktif dalam Proses Politik.

Kader sadar demokrasi aktif dalam proses politik, termasuk menjadi anggota partai politik, organisasi masyarakat sipil, atau kelompok politik lainnya. Mereka berpartisipasi dalam pemilihan umum, kampanye politik, dan diskusi politik untuk memengaruhi arah kebijakan.

d. Pengajaran dan Pendidikan Politik

Mereka berperan sebagai pendidik politik dalam masyarakat, memberikan pelatihan, seminar, dan materi edukasi untuk meningkatkan pemahaman politik warga negara dan memotivasi partisipasi aktif dalam proses politik.

e. Advokasi untuk Perubahan Positif

Kader sadar demokrasi menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk melakukan advokasi terhadap perubahan kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Mereka berbicara atas nama masyarakat dan mendukung isu-isu yang mereka yakini penting untuk kemajuan demokrasi, seperti terlihat pada Gambar 4.

Ajak Kader PKK Jadi Duta Demokrasi di Masyarakat

TASIK, RADSIK - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Siliwangi Tasikmalaya menggelar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Aula Kantor Kecamatan Cipedes, Selasa (4/7/2023).

Dengan tema Penguatan Gerakan Kecamatan Sadar Demokrasi pada Kelompok Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Cipedes.

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Dekan FISIP Universitas Siliwangi Ir Nina Herlina Dra MT, Wakil Dekan Keuangan dan Umum FISIP Taufik Nurohman SIP MA, Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP Fitriyani Yuliawati SIP MSI.

Ketua jurusan Ilmu Politik FISIP Wiwi Widastuti SIP MS, Dosen FISIP Unsil Biska Sarofah SIP MIP dan Dosen FISIP Unsil lainnya Hilal Ramdhani MIP. Termasuk Camat Cipedes Cecep Ridwan.

Wakil Dekan Keuangan dan Umum FISIP Universitas Siliwangi Taufik Nurohman SIP MA mengatakan, hal yang disampaikan kepada ibu-ibu kader PKK dalam acara ini yakni aplikasi berdemokrasi dan berpolitik dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

"Butuh penguatan dalam berdemokrasi dan pemahaman politik ini karena sering waktu banyak tantangannya. Maka lewat penguatan gerakan kecamatan sadar demokrasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesadaran politik dan demokrasi," terang Taufik, kepada wartawan.

Dia menambahkan, nilai demokrasi itu dapat diwujudkan dalam kehidupan

sehari-hari termasuk dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat.

"Kami menyampaikan lewat ibu-ibu kader PKK untuk menjadi duta demokrasi bagi masyarakat sekitarnya. Mengingatkan dalam memilih sesuai hati nurani, menjadi pemilih yang cerdas, mengawal pemimpin dan tahu *track record*-nya," paparnya.

Diharapkan kader PKK ini menjadi duta demokrasi di masyarakat. Kenapa sasaran nya ibu-ibu karena mempunyai peran sentral di masyarakat termasuk dalam pemahaman dan kesadaran politik dan berdemokrasi.

"Mudah-mudahan melalui penguatan kader PKK ini, pemilih menjadi cerdas, sesuai hati nurani, dan tidak berpikir pragmatis," tambah dia.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Siliwangi Ir Nina Herlina Dra MT mengatakan tujuan dari kegiatan penguatan gerakan kecamatan sadar demokrasi ini merupakan sosialisasi dan penyempurnaan pemahaman kepada ibu-ibu khususnya kader PKK di Kecamatan Cipedes ini.

"Bisa meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita akan menghadapi Pemilu 2024 dan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi dalam upaya Pemilu yang kondusifitas dan aman," ujar dia.

Dia menambahkan, kader PKK bisa menjadi ujung tombak sarana edukasi politik termasuk dalam perkembangan sosial media, yang tidak boleh kalah dengan anak muda. Maka mendeklarasikan bersama dalam kesadaran demokrasi.

Camat Cipedes Kota Tasikmalaya

Cecep Ridwan SSTP mengatakan, sangat menyambut baik kegiatan penguatan gerakan kecamatan sadar demokrasi kepada tim penggerak PKK Kecamatan Cipedes yang dilaksanakan oleh pada dekan dan dosen dari FISIP Universitas Siliwangi.

"Kami merasa bangga dengan kedatangan dekan dan dosen FISIP Unsil yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Merasa bangga menjadi sasaran kegiatan. Kegiatan sadar demokrasi ini sangat relevan dalam menghadapi Pemilu 2024," ungkap dia.

Dia menyebutkan, ibu-ibu yang hadir dalam kegiatan ini selain kader PKK, juga ada kader posyandu, kader penggerak keluarga, yang jelas ikut dalam penyelenggaraan negara, termasuk berdemokrasi.

"Saya yakin menjelang Pemilu ini suhu politik akan meningkat, kadang-kadang menjadi perpecahan kerukunan di lingkungan. Dengan penguatan sadar demokrasi ini jangan sampai perbedaan politik menjadi perpecahan di lingkungan sekitar kita bahkan dalam kehidupan rumah tangga," ajak nya.

Salah satu kader PKK Cipedes Minatul Mahmudah mengatakan dari hasil kegiatan penguatan sadar demokrasi ini, ia menjadi tahu bahwa berdemokrasi itu bisa dimulai dari lingkungan keluarga.

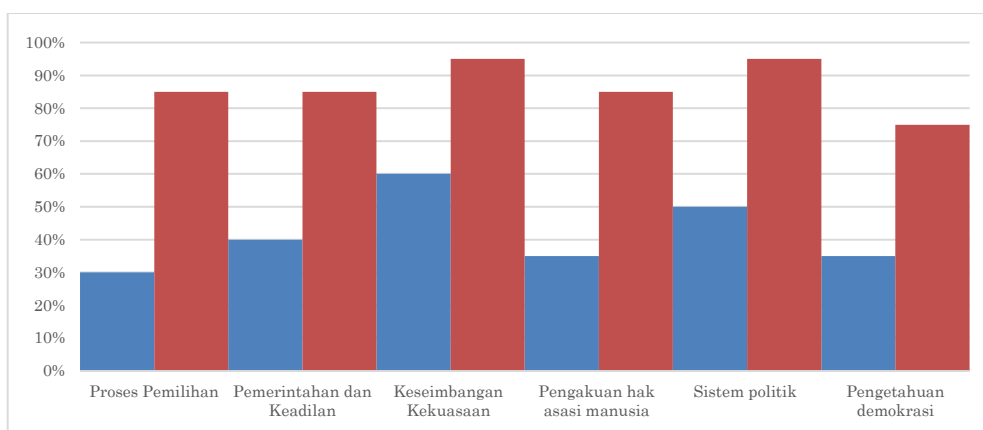
"Jadi di mulai dari lingkungan terdekat dari lingkungan keluarga, memberikan pendidikan politik dan cara berdemokrasi kepada anak, maka akan tertanam sejak dini belajar demokrasi bersama di keluarga," tuturnya. (dik)

Gambar 4. Publikasi Kader PKK menjadi Duka Demokrasi
Sumber: Publikasi Radar Tasikmalaya

Berdasarkan pada hasil pretest dan posttest dengan indikator demokrasi menyatakan bahwa rata-rata keberhasilan pengabdian antara lain 87% dengan pre-test sebanyak 42 %, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pretest dan Posttest dengan Indikator Demokrasi

Indikator Pengetahuan Indeks Demokrasi	Pre-test	Post-Test
Proses Pemilihan	30%	85%
Pemerintahan dan Keadilan	40%	85%
Keseimbangan Kekuasaan	60%	95%
Pengakuan hak asasi manusia	35%	85%
Sistem politik	50%	95%
Pengetahuan demokrasi	35%	75%
	42%	87%



Gambar 5. Perbandingan Pre-test dan Post-Test

D. SIMPULAN DAN SARAN

Program kegiatan penguatan gerakan kecamatan sadar demokrasi pada kelompok tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Cipedes dilaksanakan melalui 3 tahapan diantaranya persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Salah satu kegiatan dalam upaya meningkatkan pemahaman demokrasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk dari demokrasi substansial. Selain itu, hal ini juga berupaya untuk mensukseskan pelaksanaan demokrasi procedural tahun 2024. Melalui 3 program utama ini menghasilkan pemahaman tentang peran perempuan dalam mendukung pilar penguatan demokrasi di Indonesia. Selain itu gerakan ini diharapkan dapat dilanjutkan untuk Gerakan demokrasi di seluruh kecamatan di Kota Tasikmalaya. Keberhasilan program ini sebanyak 87 %. Saran dari tim pengabdian diantaranya adalah keterlibatan kegiatan penguatan sadar demokrasi pada kelompok masyarakat desa dengan penggerak tim dari duta demokrasi. Oleh karena itu, kegiatan ini bisa berlanjut dengan memastikan peran dari duta demokrasi tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Siliwangi yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdi Muhammad, H., Nopyandri, N., & Babas, U. (2020). Sosialisasi Pendidikan Politik Untuk Siswa Sekolah Pinggiran Kota Jambi Dalam Menghadapi Pilkada Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020. *RAMBIDEUN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 19–24. <https://doi.org/10.51179/pkm.v3i3.77>
- Abhipraya, F. A., Sadayi, D. P., & Putri, F. A. (2020). Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) sebagai LSM Kepemiluan dalam Melawan Praktik Politik Uang. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 165–190. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.8556>
- Destemi, S., & Hartati, H. (2020). Pendidikan politik perempuan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi tahun 2020. *Unri Conference Series*:

- Community Engagement*, 2, 265–268. <https://doi.org/10.31258/unricisce.2.265-268>
- Esfandiari, F., & Cholidah. (2021). Pendampingan Kelompok PKK Desa Mulyoagung dalam Proses Pemilu Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional. *J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 76–82. <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v6i1.2345>
- Gani, M. H., Daud, M., & Ridfah, A. (2022). *METAPSIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Psikologi Efektivitas Modul Pendidikan Politik Terhadap Efikasi Politik dan Partisipasi Politik Pada Siswa SMA di Kabupaten Barru METAPSIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Psikologi*. 1(November), 40–50. <https://doi.org/010.0000/xxxxxx-xxx-0000-0>
- Irtanto, I. (2015). Perilaku Politik Pemilih Perempuan Kota Mojokerto Pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 18(2), 115–128. <https://doi.org/10.20422/jpk.v18i2.41>
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 72–94. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194>
- Muzaqqi, F. (2013). Diskursus Demokrasi Deliberatif Di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 03, 1.
- Noor, M. (2018). Tahun Politik: Antara Demokrasi Prosedural-Substansial. *Mimbar Administrasi*, Vol. 2(1), 80–86.
- Puji Laksono. (2020). Komunikasi Massa Dan Demokrasi Dalam Arus Sistem Politik. *Mediakita*, 4(1), 62–73. <https://doi.org/10.30762/mediakita.v4i1.2448>
- Sofianto, A. (2011). Budaya Politik Masyarakat Lokal: Studi Kasus Di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Pasca Orde Baru. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 9(2), 1–9.
- Suharyanto, A. (2016). Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 6(2), 123. <https://doi.org/10.31289/jap.v6i2.1051>
- Wahyuningsih, E., Yunas, N. S., & Rohmad Jatmiko, A. (2021). Strengthening Community in Increasing Village Potential Through Pentahelix Collaboration. *International Journal Of Research In Business And Social Science*, 10(1), 149–157. <https://www.ssbfnct.com/ojs%0A/index.php/ijrbs>
- Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Indonesia. *INTERAKTIF Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1–28. <https://interaktif.ub.ac.id>